



LKjIP | 2021

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PINTU
TERPADU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Telp : 0763 - 33630

Email: dpmptsptkmeranti@gmail.com

KATA PENGANTAR

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja adanya Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2020 yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Meranti. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran dan realisasi anggaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Selatpanjang, Januari 2022

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



ISMIA TUN, SE.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19651011 198903 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
1.3 Isu Stretegis.....	13
1.4 Landasan Hukum.....	14
1.5 Sistematika.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	17
2.2 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPTK.....	20
2.3 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	25
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	26
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	28
3.3.1 Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	28
3.3.2 Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja.....	39
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	57
BAB IV PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Ruang Gaji (Per Desember 2020).....	7
Tabel 1. 2	Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan (Per Desember 2020)	8
Tabel 1. 3	Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per Desember 2020).....	9
Tabel 1. 4	Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perjenjangan (Per Desember 2020).....	10
Tabel 1. 5	Saran dan prasarana kerja di DPMPTSPK.....	11
Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSPK.20	
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Tahun 2020	21
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja DPMPTSPK Tahun 2020	22
Tabel 2. 4	Program dan Alokasi Dana DPMPTSPK Tahun 2020.....	22
Tabel 3. 1	Kode Warna Persentase Capaian Target Kinerja Instansi Pemerintah.....	25
Tabel 3. 2	Kode warna realisasi capaian kinerja di bawah 100%	26
Tabel 3. 3	Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020.....	27
Tabel 3. 4	Analisis Pencapaian Meningkatnya Nilai Investasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 5	Program dan Kegiatan Yang Menunjang Sasaran 1	32
Tabel 3. 6	Capaian Program dan Kegiatan Sasaran 1	33
Tabel 3. 7	Capaian Kegiatan Tahun 2019-2020 Untuk Sasaran 1	35
Tabel 3. 8	Analisis Pencapaian Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	36
Tabel 3. 9	Analisis Pencapaian Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	41
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPK Kab. Kepulauan Meranti dengan Kementerian Ketenagakerjaan	46
Tabel 3.11	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	47
Tabel 3. 12	Program, Kegiatan di Umum Sekretariat	50
Tabel 3. 13	Capaian Program dan Kegiatan di Umum Sekretariat.....	53
Tabel 3. 14	Capaian Kegiatan Tahun 2019-2020 Kegiatan di Umum Sekretariat	56
Tabel 3. 15	Akuntabilitas Keuangan DPMPTSPK Tahun 2020	58
Tabel 3. 16	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	60
Tabel 3.17	Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020	61
Tabel 3. 18	Penyerapan Anggaran Pada Setiap Tujuan DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Meranti 2020.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPSTPK Kab. Kep. Meranti.....	6
Gambar 1. 2 Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan Ruang Gaji	7
Gambar 1. 3 Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan (Per Desember 2020).....	8
Gambar 1. 4 Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal	9
Gambar 1. 5 ASN Berdasarkan Diklat Struktural	10
Gambar 3. 1 Ruang Pelayanan di DPMPSTPK Kabupaten	38

1.1 Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Organisasi Perangkat Daerah**, dan unit kerja

mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang melaksanakan tugasnya di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik yaitu setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2021.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyusun LKjIP Tahun 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjapada tahun berikutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan isu strategis.

1.1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.

1.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Program serta Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

c. UPT Latihan Kerja, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi DPMPSTPTK Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan oleh Kepala UPT Latihan Kerja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

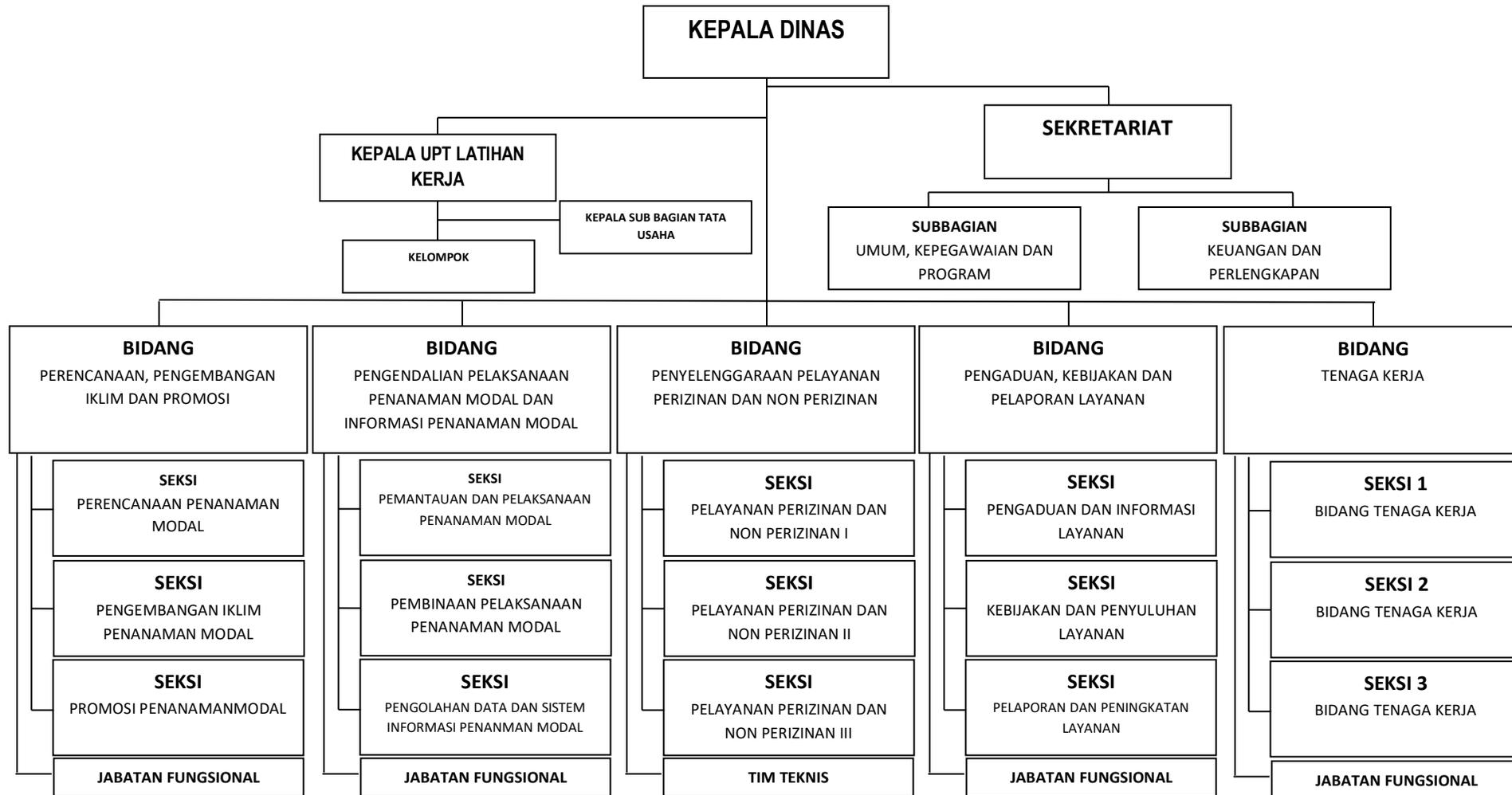
d. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas merencanakan, mengkaji, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, fasilitasi pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal. Serta menyelenggarakan urusan pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal.

- e. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Khususnya tugas-tugas yang terdapat pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, pada urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, kesehatan, Pendidikan, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Sosial dan Tenaga kerja, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Pariwisata, Perhubungan, Lingkungan hidup, Koperasi usaha kecil dan menengah, Kebudayaan, Kelautan dan perikanan, Penanaman Modal.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Serta menyelenggarakan urusan pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan serta Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- h. Bidang Tenaga Kerja**, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas

Tenaga Kerja serta Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPSTPTK Kab. Kep. Meranti



1.1.3 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, didukung dengan 27 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan perincian sebagai berikut:

a. Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang Gaji.

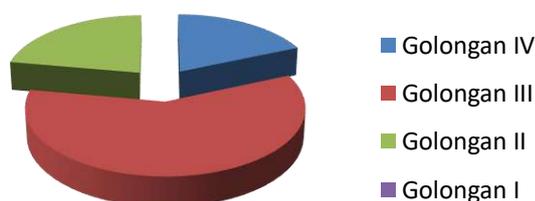
Berdasarkan data pada Tabel 1.1. diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 16 orang atau 56.67%, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II yang berjumlah 6 orang atau 20.00%.

Tabel 1. 1 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Ruang Gaji (Per Desember 2021)

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Golongan IV	5	23.33
2	Golongan III	16	56.67
3	Golongan II	6	20.00
4	Golongan I	0	0.00
JUMLAH		27	100.00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara sederhana kondisi Aparatur Sipil Negara menurut golongan ruang gaji dapat dilihat Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1. 2 Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan Ruang Gaji

b. Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan/Esselonering.

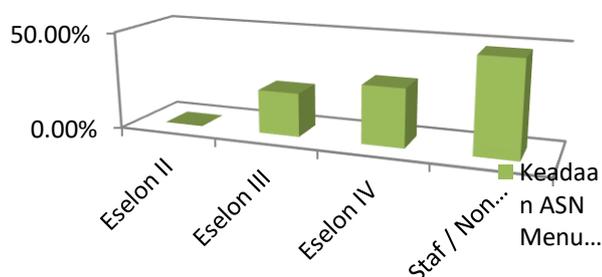
Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 27 orang. Berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2 Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan (Per Desember 2020)

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Eselon II	0	3.33
2	Eselon III	6	16.67
3	Eselon IV	8	43.33
4	Staf / Non Struktural	13	36.67
JUMLAH		27	100.00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara DPMPSTPTK menurut Jabatan/Esselon dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 1. 3 Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan (Per Desember 2021)

c. Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Berdasarkan tingkat pendidikan formal aparatur sipil negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, diuraikan ke dalam 7 (tujuh) tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini

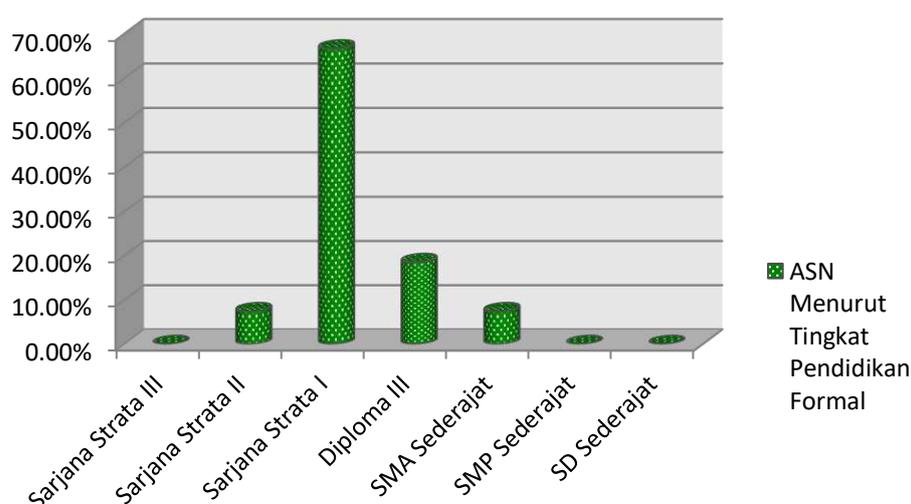
Tabel 1. 3 Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per Desember 2020)

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Sarjana Strata III	0	0.00
2	Sarjana Strata II	2	9.68
3	Sarjana Strata I	18	64.52
4	Diploma III	5	16.13
5	SMA Sederajat	2	9.68
6	SMP Sederajat	0	0.00
7	SD Sederajat	0	0.00
JUMLAH		27	100.00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Tabel 1.3. diketahui bahwa tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 18 orang atau 64.52%.

Secara sederhana gambaran ASN Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti menurut tingkat Pendidikan Formal dapat dilihat Gambar 1.4 berikut ini.



Gambar 1. 4 Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal

d. Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Penjurangan

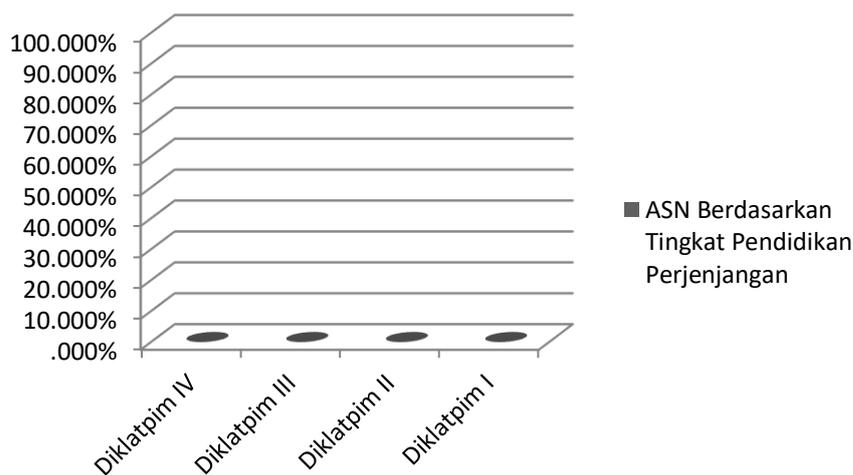
Berdasarkan tingkat pendidikan perjurangan aparatur sipil negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat pendidikan perjurangan dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1. 4 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perjurangan (Per Desember 2021)

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Diklatpim IV	0	0.00
2	Diklatpim III	2	66.67
3	Diklatpim II	0	0.00
4	Diklatpim I	0	0.00
JUMLAH		2	66.67

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 1.5 menggambarkan bahwa hanya 2 (Dua) orang ASN yang telah mengikuti pendidikan perjurangan yakni 2 (Dua) orang Diklatpim III dari 6 (orang) dari jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang serta 1 (satu) orang.



Gambar 1. 5 ASN Berdasarkan Diklat Struktural

Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terletak di Jalan Kartini. Untuk menunjang kinerja pelayanan ASN dilingkungan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, sarana dan prasarana kerja di sebar disekretariat dan bidang-bidang. Adapun kondisi keadaan sarana dan prasarana kerja tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 Sarana dan prasarana kerja di DPMTSPTK

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
1	KendaraanRoda Empat	1	
2	KendaraanRodaDua	8	
3	Mesin Bor	2	
4	Mesin Kompresor	2	
5	Peralatan Las Listrik	1	
6	Gergaji Besi	2	
7	Topeng Las	2	
8	Kunci Inggris	1	
9	Mesin Penghitung Uang	2	
10	Filing Cabinet Besi	30	
11	Lemari Kayu	23	
12	Lemari Besi/Metal	5	
13	CCTV	1	
14	Papan Informasi	4	
15	Teralis	1	
16	Papan Visual/Papan Nama	1	
17	Papan Nama Instansi	1	
18	Papan Absen	1	
19	Alat Penghancur Kertas	3	
20	Meja Kerja Kayu	18	
21	Kursi Kerja	4	
22	Meja Kerja Kayu	5	
23	Kursi Kerja	5	
24	Tempat Tidur Besi	56	
25	Sofa	5	
26	Kursi Putar	5	
27	Kursi Biasa	47	
28	Meja Ketik	1	
30	Meja Rapat	1	

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
31	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	
32	Mesin Pemotong Rumput	1	
33	A.C. Split	22	
34	A.C. Standing Flour	2	
35	Portable Air Conditqg ioner (Alat Pendingin)	1	
36	Kipas Angin	12	
37	Lemari Es	7	
38	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	
39	Rak Piring Alumunium	2	
40	Sound System	1	
41	Mesin Jahit	19	
42	Gordyin/Kray	57	
43	Dispenser	6	
44	Televisi	8	
45	Tiang Bendera	1	
46	Pelubang Kancing	2	
47	Mesin Bordir	3	
48	Meja Kerja Pejabat Eselon	27	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon	21	
50	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2	
51	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	5	
52	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23	
53	Intercom Unit	1	
54	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	
55	Facsimile (Mesin Fax)	1	
56	Wireless base station + surveillance manpack kit	5	
57	ANTENA ALL BAND	1	
58	Genset	1	
59	Kamera Digital	3	
60	Mainframe (Komputer Jaringan)	4	
61	Peralatan Komputer Jaringan Lain-lain	2	

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
62	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	
63	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	
64	Jaringan Internet	1	
65	P.C Unit	17	
66	Lap Top	6	
67	Note Book	11	
68	P.C Unit	5	
69	Note Book	22	
70	External/ Portable Hardisk	5	
71	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	
74	Mainboard Komputer	1	
75	Tabung cat kompresor	1	
76	Tempat Koran	2	
77	Tenda	1	
78	Mesin Kalkulator	5	
79	Mesin Foto Copy	1	
80	Jam Dinding	8	
81	Peralatan Dapur	1	
82	Personal Komputer	1	
83	Kotak Saran	2	
84	Brangkas	1	
85	Proyektor	1	
86	Senter	2	
87	Tang Crimping Cat 6	1	

1.3 Isu Strategis

Berpedoman kepada RPJMD serta memperhatikan peluang dan ancaman Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, maka kami merumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai ujung tombak pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama instansi pemerintah dengan dunia usaha/swastadaerah/nasional/asing;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem informasi investasi;
4. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal dalam rangka kepatuhan melaporkan perkembangan investasi secara berkala;
5. Belum dilakukan sosialisasi Sistem Operasional Prosedur (SOP);
6. Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014

- tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 (27 Oktober 2020).
 11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 9)

1.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DPMPTSPTK dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Rencana Strategis DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap II RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisimasa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarityof direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isustrategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah :

**“MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA
YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT
MADANI”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021 maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021 meliputi:

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur kebudayaan melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani;
2. Mewujudkan kawasan niaga;
3. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat;
4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan potensi daerah;
6. Meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, ditinjau dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berkontribusi upaya pencapaian visi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021 berada di bawah *misi 2* yaitu :*Mewujudkan kawasan niagaan misi 5* yaitu *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah*, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan4.1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan

Sasaran4.1.1 : Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

Sasaran4.1.2: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Kontribusi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap misi ke 2 (dua) dan ke 5 (lima), sekaligus sasaran kinerja bagi DPMPSTPTK berkaitan dengan tenaga kerja berkualitas dan investasi.

1. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja berkualitas sama halnya dengan tenaga kerja yang terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal.
2. Investasi adalah penyediaan barang atau jasa yang tidak dikonsumsi sekarang tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang dengan mengharapkan imbal balik yang lebih besar dari modal awal yang telah dikeluarkan baik secara perorangan ataupun kelompok usaha / korporasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah diperhitungkan secara matang.

Pemantapan fungsi dan peran dalam meningkatkan nilai investasi dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas harus melalui upaya-upayayang lebihcerdas dan terarah serta terukur. Peningkatan nilai investasi dan kualitas tenaga kerja ditunjang dengan adanya potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sertasemangat kebersamaan

dan tanggung jawab dari seluruh aparat DPMPTSPK. Sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK dalam mendukung nilai investasi Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terealisasi dengan maksimal. Adapun tujuan dan sasaran DPMPTSPK sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSPK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Akhir Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai Investasi	Rp 6M	Rp7.5M	Rp8.5M	Rp 9M	Rp9.5M	Rp 10M
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	-	-	70.01	70.82

Tujuan dan sasaran ini merupakan turunan yang integral dari misi Bupati Kepulauan Meranti, pada misi 2 yaitu : *Mewujudkan kawasan niaga* dan misi 5 yaitu *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah*.

2.2 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif

keberhasilannya. DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti mengampun urusan investasi dan tenaga kerja. Berdasar urusan dan program yang diampu, indikator kinerja utama DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 adalah:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPTK Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai Investasi	Rp10M
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.82

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti berisikan penugasan dari Bupati Kepulauan Meranti untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mewujudkan Visi, Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja DPMPTSPK Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai Investasi	Rp. 10 Milyar
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Kerja	70.82%

Sumber Data : Renstra DPMPTSPK Kab. Kepulauan Meranti 2016-2021

Untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, berdasarkan perubahan Renja Tahun 2021 program dan kegiatan beserta pagu dana yang digunakannya antara lain:

Tabel 2. 4 Program dan Alokasi Dana DPMPTSPK Tahun 2021

NO	URAIAN	PAGU DANA
1	Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,671,274,206.00
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,940,000.00
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49,940,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	2,760,170,336.00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,760,170,336.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	651,394,520.00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,878,010.000
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140,498,730.000
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69,985,580.000
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69,940,200.00
	5 Fasilitas Kunjungan Tamu	30,000,000.00
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319,092,000.00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	209,148,900.00
	1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60,000,000.00
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149,149,900.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	881,014,450.00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,950,000.00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116,581,050.00
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	746,483,400.00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119,606,000.00

NO	URAIAN		PAGU DANA
1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,932,000.00
	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,748,000.00
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,926,000.00
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		21,150,000.00
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		21,150,000.00
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	21,150,000.00
3	Program Hubungan Industrial		25,000,000.00
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		25,000,000.00
	1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00
4	Program Promosi Penanaman Modal		599,806,000.00
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan		599,806,000.00
	1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	599,806,000.00
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		326,111,350.00
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		326,111,350.00
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48,299,700.00
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	181,212,250.00
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96,599,400.00

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. LKj IP tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kode Warna Persentase Capaian Target Kinerja Instansi Pemerintah

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Light Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Kode warna realisasi capaian kinerja di bawah 100%

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Out Put*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Oleh sebab itu setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menetapkan Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan sebagai tolok ukur capaian kinerja.

Capaian kinerja DPMPSTPTK Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja DPMPSTPTK Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian kinerja DPMPSTPK Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 sebagaimana yang telah dijanjikan pada Perjanjian Kinerja disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Investasi	Rupiah	10M	30.96	309.60 %
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	70.82	65.60	92.63%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Sasaran sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai Investasi dengan realisasi sebesar 30.96 Milyar dan pada indikator nilai investasi dengan capaian kinerja 309.60%.
- Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja tidak melebihi/melampaui target sehingga tidak memenuhi capaian kinerja sebesar 100%. Rrealisasi indikator tingkat partisipasi angkatan kerja hanya sebesar 65.60 dengan capaian kinerja sebesar 92.63%. Untuk sementara data yang gunakan adalah data olahan Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Hal ini dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti belum merelease data tingkat partisipasi angkatan kerja.

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.

3.3.1 Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya iklim investasi yang baik yang ditunjang oleh produktivitas yang tinggi. Dengan adanya investasi berarti akan menambah kapasitas input dalam proses produksi hingga pada akhirnya akan menambah output dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya investasi maka setiap pemerintah dituntut untuk memiliki daya saing investasi yang tinggi. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain :

1. Faktor Sumber Daya Alam,
2. Faktor Sumber Daya Manusia,
3. Faktor stabilitas politik perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha,
4. Faktor kebijakan pemerintah,
5. Faktor kemudahan dalam perizinan

Indikator untuk mengetahui seberapa besar meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti ditandai dengan Nilai Investasi yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti yang diukur dengan :

Nilai Investasi

= Jumlah investai yang dilaporkan oleh investor melalui aplikasi BKPM

Capaian meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan Tahun akhir Renstra yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Analisis Pencapaian Meningkatnya Nilai Investasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Renstra 2016-2021	
			Target	Realisasi	%	Target	%												
1	Nilai Investasi	Rupiah	7,5M	18,4M	245,33	8,5M	29,6M	348,24	9M	19,14M	212,67	9.5 M	9.86 M	103.79	10 M	30.96 M	309.60	10 M	309.60
Rata – Rata Capaian Kinerja			7,5M	18,4M	245,33	8,5M	29,6M	348,24	9M	19,14M	212,67	9.0 M	9.86 M	103.79	10 M	30.96 M	309.60	10 M	309.60

Nilai investasi selama periode 2017- 2021 berfluktuasi, terjadi peningkatan dan penurunan capaian kinerja yang dapat di lihat pada Tabel 3.4. Nilai investasi tahun 2021 terealisasi sebesar 30.96 milyar rupiah merupakan eviden indikator nilai investasi pada triwulan III karena untuk eviden triwulan IV LKPM belum di *realease* oleh BKPM. Indikator ini melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2021 dengan menargetkan sebesar 10 milyar rupiah. Capaian kinerja indikator ini sebesar 309.60%, Hal ini juga menunjukkan bahwa melebihi 100%. Dapat disimpulkan bahwa indikator nilai investasi mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2020, target indikator sasaran sebesar Rp 9.5 M dengan realisasi sebesar Rp 9.86 M atau sebesar 103.79%. Sehingga jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan kinerja. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPSTK periode 2016-2021, maka capaian nya sebesar 309.60%. Dengan capaian tersebut sudah melebihi target akhir Renstra periode 2016 – 2021 sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerja untuk indikator sasaran ini sudah sangat memuaskan mencapai target akhir Renstra dan dapat terus meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Realisasi kinerja dapat dikatakan berhasil perlu dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja lainnya yang sejenis. Pada tahun 2021 belum dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja indikator nilai investasi se Provinsi Riau serta membandingkan realisasi nilai investasi nasional yang tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini dikarenakan belum ditemukan data pembanding baik yang di *realease* oleh Provinsi Riau maupun Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan, dicapai melalui 2 (dua) program dan kegiatan yakni :

- Program Promosi Penanaman Modal
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Output Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja nilai investasi yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Program dan Kegiatan Yang Menunjang Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/Kurang
1	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	599,806,000	522,351,300	Jumlah Jenis Kegiatan Promosi Yang Dilaksanakan	Menunjang
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48,299,700	48,299,700	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan	Menunjang

						an Penanaman Modal	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	181,212,250	181,212,250	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Menunjang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96,599,400	96,599,400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Menunjang

Sumber Data : Data DPMPTSPK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Capaian program dan kegiatan sasaran 1 dapat diperoleh dengan membandingkan target dan realisasi anggaran serta outputnya. Berikut disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Capaian Program dan Kegiatan Sasaran 1

No	Program dan Kegiatan	Output			Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
		Indikator	Target	Realisasi			
1	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	24.99 %	24.99%	599,806,000	522,351,300	100.00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	24.99 %	24.99%	599,806,000	522,351,300	100.00%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Promosi Yang Dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	599,806,000	522,351,300	100.00%

2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perentase Peningkatan Pelaporan Penanaman Modal	5.00%	5.00%	326,111,350	199,770,000	100.00%
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerahn Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penanaman Modal Daerah Kabupten/Kota yang Terlaksana	5.00%	5.00%	326,111,350	326,111,350	100.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	48,299,700	48,299,700	100.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	181,212,250	181,212,250	100.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	96,599,400	96,599,400	100.00%

Sumber Data : Data DPMPSTPK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Tabel di atas menjelaskan tentang output dari program dan kegiatan Tahun 2021 untuk sasaran Nilai Investasi. Dapat dilihat bahwa rata-rata output program dan kegiatan sebesar 100.00%. Sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sangat menunjang pencapaian realisasi sasaran Nilai Investasi.

Untuk mengetahui suatu kinerja memiliki peningkatan capaian kinerja atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut ini akan menyajikan capaian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 dengan melihat program/kegiatan pada kedua tahun tersebut.

Tabel 3. 7 Capaian Kegiatan Tahun 2020-2021 Untuk Sasaran 1

No	Program/Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-	24.99%	24.99%	100.00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	-	-	-	24.99%	24.99%	100.00%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100%
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	5.00%	5.00%	100%
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerahn Kabupaten/Kota	-	-	-	5.00%	5.00%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%

Sumber Data : Data DPMTSPTK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Perbandingan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2021 menurut kegiatan untuk sasaran Nilai Investasi dapat dilihat pada Tabel di atas. Tabel di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan dan tetap capaian realisasi fisik kegiatan pada kegiatan yang sama. Capaian realisasi fisik kegiatan tahun 2020 dan 2021 tidak bias dilakukan perbandingan karena kegiatan pada tahun 2021 merupakan kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada di tahun 2020.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Analisis Pencapaian Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Nilai Investai	Rupiah	10 M	30.96 M	309.60	Program Promosi Penanaman Modal	599,806,000	522,351,300	87.09
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	326,111,350	326,111,350	100.00 %
Rata-Rata Capaian Kinerja					309.60	Rata-Rata Kinerja Keuangan			93.55
Tingkat Efisiensi									216.05
Tingkat Efektifitas									330.95

Sumber Data : Olahan Data DPMPSTPK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran pertama adalah 330.95%, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong kategori sangat baik. Artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Tingkat efisiensi 216.05%, menunjukkan selisih persentase realisasi kinerja capaian sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti melebihi persentase dari realisasi anggaran. Selaras dengan tingkat efektifitas 330.95%, menunjukkan persentase capaian kinerja lebih besar jika dibandingkan persentase realisasi anggaran program kegiatan.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut :

❖ Faktor Pendukung

1. Berada di kawasan kerjasama segitiga emas (*Golden Triangle*) IMS-GT dan IMT-GT merupakan peluang dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;
2. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang strategis berada di alur internasional selat Malaka;
3. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan *hinterland* kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun (TBK).
4. Pelayanan Perizinan *Online*

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengembangkan sistem pelayanan perizinan *online* yakni SEMPOLET dan *Online Single Submission* (OSS). Penerapan pelayanan *online* merupakan upaya untuk memberikan kemudahan dalam perizinan sehingga investor tidak perlu datang langsung ke DPMPSTPTK untuk melakukan pengurusan izin. Sistem tersebut merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang ada agar pelayanan kepada warga bisa maksimal dengan tujuan menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya dan potensi kota digunakan lebih efektif dan efisien. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mewujudkan Meranti Bandar Niaga merupakan langkah strategis guna mengurai permasalahan di Meranti hari ini dan masa yang akan datang.

Pelayanan perizinan yang mudah di dukung dengan layanan Perizinan dan Non Perizinan yang nyaman dan dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan, seperti:

1. Tersedianya layanan pengaduan perizinan dan non perizinan yang siap menanggapi keluhan dari pelaku usaha.
2. Tersedianya kelengkapan fasilitas yang melayani perizinan *online*

yaitu OSS (Online Single Submission) dan Sempolet (Sistem Informasi Perizinan Online Terpadu).

3. Tersedianya SDM yang kompeten yang membidangi perizinan dan non perizinan.
4. Tersedianya ruangan pelayanan perizinan dan non perizinan



Gambar 3. 1 Ruang Pelayanan di DPMPSTPK Kabupaten Kepulauan Meranti

❖ **Faktor Penghambat**

1. Koordinasi dan kerjasama instansi pemerintah dengan dunia usaha/swastadaerah/nasional/asing yang belum maksimal;
2. Infrastruktur di daerah - daerah potensi investasi yang belum memadai.
3. Ketidakpastian atas lahan hutan yang berkaitan dengan RTRW Provinsi.
4. Kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mengatur perizinan dan non perizinan yaitu belum adanya Peraturan Daerah tentang Perizinan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja dengan jalan memonitor proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanaman modal yaitu dengan membentuk sebuah tim yang dapat mengawasi izin penanaman modal yang telah diterbitkan serta di dukung dengan aplikasi pengawasan penanaman modal. Pembinaan dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan persuasive kepada para pengusaha agar mereka melaporkan laporan per Triwulan perusahaannya ke BKPM.
2. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang sesuai dengan bidang tugasnya baik kualitas dan kuantitas agar professional, tanggap, cepat, dan bersemangat dengan jalan mengadakan pembekalan dan pelatihan serta magang di instansi terkait dengan bidangnya.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait proses perizinan secara *online* serta melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintahan untuk meningkatkan proses perizinan yang prima dan terintegrasi.
4. Melakukan promosi peluang investasi melalui event-event promosi agar mendapat investor yang bersedia berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.3.2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara

aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara 16 dan 64 tahun. Statistik ini berguna untuk menganalisis pasar tenaga kerja, terutama ketika anda menyandingkannya dengan tingkat pengangguran. Ketika ekonomi tumbuh dengan kuat, tingkat partisipasi meningkat karena prospek lapangan kerja dan upah membaik.

Tingkat partisipasi kerja yang tinggi berarti banyak orang yang bekerja, atau paling tidak, rajin mencari pekerjaan. Itu kemungkinan terjadi selama ekonomi makmur. Lapangan kerja melimpah karena bisnis meminta lebih banyak tenaga kerja untuk meningkatkan produksi.

Indikator untuk mengetahui seberapa besar meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat dilihat dari persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dengan perumusan sebagai berikut :

$$\textit{Tingkat partisipasi angkatan kerja} = \frac{\textit{angkatan kerja}}{\textit{penduduk usia kerja}} \times 100\%$$

Capaian meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan Tahun akhir Renstra yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Renstra 2016-2021	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	-	64,93	-	-	68,93	-	-	67,65	-	70,01	67,65	96,63	70,82	65,60	92,63	70,82	95,52
Rata – Rata Capaian Kinerja			-	64,93	-	-	68,93	-	-	67,65	-	70,01	67,65	96,63	70,82	65,60	92,63	70,82	92,63

Sumber Data : buku Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi indikator sasaran pada Tahun 2020. Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan hanya terealisasi sebesar 65.60% dari yang ditargetkan 70.82% sehingga capaian realisasinya sebesar 92.63%. Data tersebut merupakan data yang diolah oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur capaian kinerja menggunakan data tersebut karena Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti belum *me-realease* data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021, yang biasanya bersumber dari buku **Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2022**.

Realisasi tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2021 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami penurunan. Capaian realisasi Tahun 2021 sebesar 95.63% sedangkan Tahun 2020 sebesar 96.63%. Capaian realisasi Tahun 2021 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang memiliki target sebesar 70.82% yaitu juga sebesar 95.63%. Hal ini juga belum mencapai target akhir Renstra. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja lagi sehingga ditahun berikutnya bisa mencapai target yang ditetapkan.

Untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan, dicapai melalui program dan kegiatan. Program yang mendukung indikator ini pada Tahun 2021 yaitu program hubungan industrial

Untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan, dicapai melalui 2 (dua) program dan kegiatan yakni :

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

- Program Hubungan Industrial

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Output Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 10 Program dan Kegiatan Yang Menunjang Sasaran 2

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/Kurang
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	21,150,000	21,150,000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan	Menunjang
2	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	23,950,000	Persentase Kasus Yang Diselesaikan	Menunjang

Sumber Data : Data DPMPTSPK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Capaian program dan kegiatan sasaran 2 dapat diperoleh dengan membandingkan target dan realisasi anggaran serta outputnya. Berikut disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Capaian Program dan Kegiatan Sasaran 2

No	Program dan Kegiatan	Output			Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
		Indikator	Target	Realisasi			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang terampil	2.02%	1.93%	21,150,000	21,150,000	100.00%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		2.02%	1.93%	21,150,000	21,150,000	100.00%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan	20 Orang	20 Orang	21,150,000	21,150,000	100.00%
2	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Penyelesaian Hubungan Industrial	60.00 %	56.33%	25,000,000	23,950,000	95.80%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		60.00 %	56.33%	25,000,000	23,950,000	95.80%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan	100%	100%	25,000,000	23,950,000	95.80%

Sumber Data : Data DPMTSPTK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Tabel di atas menjelaskan tentang output dari program dan kegiatan Tahun 2021 untuk sasaran tingkat partisipasi angkatan kerja. Dapat dilihat bahwa rata-rata output program dan kegiatan sebesar 97.50%. Sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan belum bisa menunjang pencapaian realisasi sasaran tingkat partisipasi angkatan kerja.

Untuk mengetahui suatu kinerja memiliki peningkatan capaian kinerja atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut ini akan menyajikan capaian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 dengan melihat program/kegiatan pada kedua tahun tersebut.

Tabel 3. 12 Capaian Kegiatan Tahun 2020-2021 Untuk Sasaran 2

No	Program/Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	2.02%	1.93%	100.00%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	-	2.02%	1.93%	100.00%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	-	20 Orang	20 Orang	100.00%
2	Program Hubungan Industrial	-	-	-	60.00%	56.33%	95.80%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	60.00%	56.33%	95.80%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	100%	95.80%

Sumber Data : Data DPMPSTPK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Perbandingan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2021 menurut

kegiatan untuk sasaran tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilihat pada Tabel di atas. Tabel di atas menyajikan pada Tahun 2021 karena pada Tahun 2020 tidak ada kegiatan yang mendukung sasaran tersebut. Capaian realisasi fisik kegiatan tahun 2020 dan 2021 tidak bisa dilakukan perbandingan karena tidak ada data pembandingnya pada Tahun 2020.

Realisasi kinerja dapat dikatakan berhasil perlu dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja lainnya yang sejenis. Pada tahun 2021 belum dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja indikator tingkat partisipasi angkatan kerja serta membandingkan realisasi tingkat partisipasi angkatan kerja nasional yang tercatat pada Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan belum ditemukan data pembandingnya.

Perbandingan peningkatan realisasi kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dengan peningkatan realisasi kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan belum bisa dilakukan perbandingan. Sehingga belum bisa disajikan kedalam bentuk Tabel seperti Lkj IP Tahun 2021 yaitu seperti Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPSTK Kab. Kepulauan Meranti dengan dengan Kementerian Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	DPMPSTK		%	Kementerian Ketenagakerjaan		%
			2020	2021		2019	2020	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	67.65	65.60	3.03	-	-	

Tabel di atas belum bisa menunjukkan perbandingan peningkatan realisasi kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dengan peningkatan realisasi kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Karena belum ditemukan baik data tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Meranti maupun tingkat partisipasi angkatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi angkatan kerja dengan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	70.82	65.60	92.63	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	21,150,000	20,250,000	95.75
						Program Hubungan Industrial	25,000,000	23,950,000	95.80
Rata-Rata Capaian Kinerja					92.63	Rata-Rata Kinerja Keuangan			95.76
Tingkat Efisiensi									(3.13)
Tingkat Efektifitas									96.73

Sumber Data : Olahan Data DPMPSTPTK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran pertama adalah 92.63%, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong kategori belum baik. Artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian tidak memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Tingkat efisiensi (3.13%), menunjukkan selisih persentase realisasi kinerja capaian sasaran meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak melebihi dari persentase dari realisasi anggaran. Selaras dengan tingkat efektifitas 96.73%, menunjukkan persentase capaian kinerja lebih kecil dibandingkan persentase realisasi anggaran program kegiatan. Kinerja yang masih rendah sedangkan keuangan melebihi capaian kinerja dikarenakan pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja hanya terdapat 1 (satu) kegiatan dan sub

kegiatan yang mendukung sasaran indikator tingkat partisipasi angkatan kerja. Sug kegiatan tersebut yaitu proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Ouput dari sub kegiatan ini hanya 30 orang yang mendapatkan pelatihan tentu saja ini sangat kecil untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja sedangkan penduduk usia kerja terus meningkat setiap tahunnya.

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya partisipasi angkatan kerja tidak dapat dihitung. Hal ini dikarenakan tidak adanya program kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Selama Tahun 2021 untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja hanya dilakukan dengan menyediakan pelayanan prima bagi masyarakat yang mencari kelengkapan atau surat keterangan bagi pencari kerja yang merupakan syarat untuk mencari pekerjaan, pembebasan biaya dalam membuat surat keterangan pencari kerja (kartu kuning), sistem yang cepat, tepat dan akurat serta pelayanan prima yang dilakukan oleh pihak DPMPSTPTK. Selain itu, juga dilakukan pelatihan tenaga kerja di bidang menjahit yang berjumlahkan 30 (tiga puluh) peserta pelatihan yang langsung dilatih oleh instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kota Padang Provinsi Sumatra Barat. Pelatihan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. Secara tidak langsung program hubungan industrial juga berpartisipasi meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, karena hubungan yang baik antara pengusaha dan tenaga kerja dapat mengurangi perselesihan hubungan industriak sehingga tidak berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja berguna untuk memproyeksi angkatan kerja, sebuah indikator pasokan tenaga kerja di dalam sebuah perekonomian. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi berarti lebih banyak pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Tingkat partisipasi yang lebih

tinggi berarti lebih banyak pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Dengan pasokan tenaga kerja yang lebih banyak, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak output.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja juga merencanakan program dan kegiatan tentang pelatihan dan kompetensi tenaga kerja yang juga merupakan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan sebagai perantara informasi pelatihan kerja kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun kelompok-kelompok tertentu.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

❖ Faktor Pendukung

1. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan *hinterland* kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun (TBK);
2. Tersedianya Angkatan Kerja.

❖ Faktor Penghambat

1. Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan kerja;
3. Peluang dan kesempatan kerja yang terbatas.
4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana SDM pada bidang Tenaga Kerja khususnya UPT-LK yang mengakibatkan tidak berfungsinya UPT-LK secara maksimal.
5. Belum adanya tenaga profesional sebagai pelatih tetap di DPMPSTPK untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja bagi pencari kerja.
6. Belum adanya program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja di DPMPSTPK di Kabupaten Kepulauan Meranti. Program ini merupakan salah satu program yang terdapat pada

Kementerian Ketenagakerjaan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung supaya UPT-LK dapat berfungsi secara maksimal.
2. Meningkatkan kinerja dan kedisiplinan ASN melalui pelatihan, pengawasan, pemberian *reward* dan *punishment* di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3. Menyediakan instruktur yang berkompeten agar dapat memberikan pelatihan tenaga kerja di UPT-LK.

Selain program dan kegiatan yang mendukung sasaran dan indikator kinerja utama juga terdapat kegiatan lainnya. Output program dan kegiatan di umum sekretariat yang menunjang terlaksananya tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Output Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan administrasi perkantoran yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 15 Program, Kegiatan di Umum Sekretariat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/Kurang
1	Program Penunjang Urusan Permerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD	49,940,000	49,620,000	Jumlah Dokumen SAKIP, SPIP OPD dan Perencanaan Kegiatan DPMPSTPK Yang Disusun	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Keuangan	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	2,760,170,336	2,633,284,619	Jumlah Tenaga Aparatur	Menunjang

	dan Perangkat Daerah				Yang Dibayarkan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,878,010	21,843,580	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dibayarkan	Menunjang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140,498,730	140,498,590	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan dan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Menunjang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69,985,580	68,111,090	Jumlah Jenis Logistik Kantor Yang Disediakan	Menunjang
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69,940,200	69,939,055	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Menunjang
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,000,000	29,045,500	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman Yang Disediakan	Menunjang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319,092,000	319,029,232	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dibayarkan	Menunjang
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60,000,000	60,000,000	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibayarkan	Menunjang
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149,149,900	149,149,900	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dibeli	Menunjang
		Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Surat	17,950,000	16,976,500	Jumlah Surat-Surat

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Menyurat			dan Administrasi Keuangan Yang Menggunakan Materai	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116,581,050	87,494,788	Tagihan Bulanan	Menunjang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	746,483,400	87,494,788	Jumlah Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Yang Dibayarkan	Menunjang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,932,000.00	9,494,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dibayar Pajak	Menunjang
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,748,000.00	49,500,000	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	Menunjang
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,926,000.00	49,732,001	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	Menunjang

Capaian program dan kegiatan di umum sekretariat dapat diperoleh dengan membandingkan target dan realisasi anggaran serta outputnya. Berikut disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 16 Capaian Program dan Kegiatan di Umum Sekretariat

No	Program dan Kegiatan	Output			Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
		Indikator	Target	Realisasi			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	96.40 %	94.63%	4,467,457,550	4,385,457,855	98.16%
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	3 Dok	3 Dok	49,940,000	49,620,000	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP, SPIP OPD dan Perencanaan Kegiatan DPMPSTPTK Yang Disusun	3 Dok	3 Dok	49,940,000	49,620,000	100.00%
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Aparatur Sipil Negara yang Dibayarkan	32 Orang	32 Orang	2,760,170,336	2,633,284,619	100.00%
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tenaga Aparatur Yang Dibayarkan	32 Orang	32 Orang	2,760,170,336	2,633,284,619	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	70%	70%	651,394,520	648,467,047	100.00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dibayarkan	10 Jenis	10 Jenis	21,878,010	21,843,580	100.00%
	Penyediaan	Jumlah Jenis Alat	20	20 Jenis	140,498,730	140,498,590	100.00%

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tulis Kantor Yang Disediakan dan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jenis				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor Yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis	69,985,580	68,111,090	100.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	6 Jenis	6 Jenis	69,940,200	69,939,055	100.00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman Yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	30,000,000	29,045,500	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	319,092,000	319,029,232	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	70%	58.49%	881,014,450	736,211,288	83.56%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat-Surat dan Administrasi Keuangan Yang Menggunakan Materai	2470 Lembar	2175 Lembar	17,950,000	16,976,500	88.06%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Bulanan	12 Bulan	12 Bulan	116,581,050	87,494,788	100.00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Yang Dibayarkan	57 Orang	47 Orang	746,483,400	87,494,788	82.46%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	70%	63.63%	119,606,000	108,726,001	90.90%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dibayar Pajak	1 Unit	1 Unit	19,932,000.00	9,494,000	100.00%

	Kendaraan Dinas Jabatan						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibayarkan	1 Gedung	1 Gedung	49,748,000.00	49,500,000	100.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dibeli	6 Jenis	6 Jenis	49,926,000.00	49,732,001	100.00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

Sumber Data : Data DPMPSTPTK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Tabel 3.13 menjelaskan tentang capaian program dan kegiatan di Umum Sekretariat Tahun 2021. Dapat dilihat bahwa rata-rata capaian program dan kegiatan sebesar 98.16%. Sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sangat menunjang pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Untuk mengetahui suatu kinerja memiliki peningkatan capaian kinerja atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut ini akan menyajikan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2021 dengan melihat program/kegiatan pada kedua tahun tersebut.

Tabel 3. 17 Capaian Sub Kegiatan Tahun 2020-2021 Kegiatan di Umum Sekretariat

No	Program/Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	32 Orang	32 Orang	100%	32 Orang	32 Orang	100%
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	31 Orang	100%	32 Orang	32 Orang	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	70%	70%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	10 Jenis	10 Jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Jenis	20 Jenis	100%	20 Jenis	20 Jenis	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	10 Jenis	10 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	70%	58.49%	83.56%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	2470 Lembar	2175 Lembar	88.06%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100.00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57 Orang	57 Orang	100%	57 Orang	47 Orang	82.46%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	70%	63.63%	90.90%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100.00%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	1	1	100.00%	1 Gedung	1	100.00%

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	Gedung			Gedung	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100.00%

Sumber Data : Data DPMPSTPTK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2021

Perbandingan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2021 menurut kegiatan di Umum Sekretariat dapat dilihat pada Tabel di atas. Tabel 3.14 menjelaskan bahwa terjadi penetapan capaian realisasi fisik kegiatan pada kegiatan yang sama dari tahun 2020 dan 2021. Tiga kegiatan yang baru pada Tahun 2021 dan sebelumnya belum ada pada Tahun 2020 sehingga belum bisa dibandingkan capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut.

4.4 Akuntabilitas Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 3 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 3,643,341,556.00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 5,280,070,505.00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93.56%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 kondisi anggaran Silpa Rp 363,271,051.00. Secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 18 Akuntabilitas Keuangan DPMPSTPTK Tahun 2021

No	Uraian	APBD Murni	DPA	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
A	Belanja Operasi	6.298.000.312	5.476.570.376	5.111.484.156	93,33%	365.086.220
1	Belanja Pegawai	3.654.484.652	2.764.920.336	2.636.084.619	95,34%	128.835.717
2	Belanja Barang dan Jasa	2.643.515.660	2.711.650.040	2.475.399.537	91,29%	236.250.53
B	Belanja Modal	175.451.180	166.771.180	166.636.349	99,92%	134.831
No	Nama Sub Kegiatan	APBD Murni	DPA	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
1	Program Promosi Penanaman Modal	499.838.000	599.806.000	522.351.300	87,09%	77.454.700
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	499.838.000	599.806.000	522.351.300	87,09%	77.454.700
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	499.838.000	599.806.000	522.351.300	87,09%	77.454.700
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	324.267.350	326.111.350	199.770.000	61,26%	126.341.350
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerahn Kabupaten/Kota	324.267.350	326.111.350	199.770.000	61,26%	126.341.350
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48.299.700	48.299.700	48.299.700	100,00%	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	179.368.250	181.212.250	181.212.250	100,00%	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.599.400	96.599.400	96.599.400	100,00%	-
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	21.150.000	20.250.000	95,74%	900.000
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	-	21.150.000	20.250.000	95,74%	900.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Komptensi	-	21.150.000	20.250.000	95,74%	900.000
5	Program Hubungan Industrial	25.000.000	25.000.000	23.950.000	95,80%	1.050.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	23.950.000	95,80%	1.050.000

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	23.950.000	95,80%	1.050.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.624.346.142	2.148.471.503	2.075.701.855	96,61%	72.769.648
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.940.000	49.940.000	49.620.000	99,36%	320
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD	49.940.000	49.940.000	49.620.000	99,36%	320
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	3.648.384.652	2.760.170.336	2.633.284.619	95,40%	126.885.717
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	3.648.384.652	2.760.170.336	2.633.284.619	95,40%	126.885.717
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	720.889.540	651.394.520	648.467.047	99,55%	12.689
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.953.030	21.878.010	21.843.580	99,84%	126.885.719
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.952.730	140.498.730	140.498.590	100,00%	126.885.720
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.985.580	69.985.580	68.111.090	97,32%	126.885.721
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.940.200	69.940.200	69.939.055	100,00%	126.885.722
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	30.000.000	29.045.500	96,82%	126.885.723
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.058.000	319.092.000	319.029.232	99,98%	126.885.724
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	955.331.050	881.014.450	736.211.288	83,56%	126.885.725
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.950.000	17.950.000	16.976.500	94,58%	126.885.726
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.581.050	116.581.050	87.494.788	75,05%	126.885.727
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820.800.000	746.483.400	87.494.788	11,72%	126.885.728
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	99.852.000	119.606.000	108.726.001	90,90%	126.885.729

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	19.932.000	9.494.000	47,63%	126.885.730
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.926.000	49.748.000	49.500.000	99,50%	126.885.731
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.926.000	49.926.000	49.732.001	99,61%	126.885.732
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	209.148.900	201.148.900	96,17%	126.885.733
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	60.000.000	60.000.000	100,00%	126.885.734
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.948.900	149.148.900	149.148.900	100,00%	126.885.735
Jumlah	6.473.451.492	3.120.538.853	2.842.023.155	87,09%	278.515.698

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 19 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Tujuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan	5,643,341,556	5,280,070,505	93,56%
	Jumlah	5,643,341,556	5,280,070,505	93,56%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2021.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan DPMPSTPK Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	Persentase (%)
A.	Tujuan 1	1		5,280,070,505	93.56%
1.	Melebihi / Melampaui Target	1	50.00%		
2.	Sesuai Target	0	0		
3.	Tidak Mencapai Target	0	0		

Pencapaian Tujuan pada Tahun 2021 merupakan pencapaian kinerja tahun kedua Renstra 2016-2021, dengan demikian diuraikan pula capaian tujuan berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Penyerapan Anggaran Pada Setiap Tujuan DPMPSTPK Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Realisasi Anggaran tahun ke-2	% (dari Pagu Indikatif)
1.	Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan	5,643,341,556	5,280,070,505	93,56%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja tujuan organisasi.

BAB

PENUTUP

IV

Laporan kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak.

LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dan Evaluasi terhadap kinerja yangtelah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerjaanggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dankegagalan.

Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
 - Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator. Indikator 1 sasaran 1 ini realisasinya mencapai target bahkan melebihi target dan memiliki predikat capaian sangat baik.

- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator. Indikator 1 sasaran 2 ini realisasinya berdasarkan data olahan DMPPTSPTK belum memenuhi target yang ditetapkan.

b. Realisasi dan Capaian Keuangan

Pada perubahan anggaran DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional kantor sebesar sebesar **Rp 5,643,341,556.00** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp 5,280,070,050.00** atau serapan dana APBD mencapai 93.56%, dengandemikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran DPMPTSPTK Tahun 2021 sebesar Rp 363,271,051.00. Anggaran tersebut terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 5,476,570,376.00 dengan realisasi sebesar Rp. 5,111,484,156 (93.33%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 166,771,180.00 dengan realisasi sebesar Rp. 166,636,349 (99.91%)

Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang tujuan dan sasaran DPMTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkontribusi terhadap misi ke 2 (dua) dan ke 5 (lima) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan persandingan antara persentase pencapaian kinerja dan persentase realiasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 sudah cukup efisien. Kemudian dengan mencermati seluruh analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup optimal. Selanjutnya capaian yang sudah baik tersebut perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Sebagai penutup, LKjIP DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Selatpanjang, 17 Januari 2020
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Meranti,

ISMIATUN, SE.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19651011 198903 2 005

DATA EVIDEN (1)

INDIKATOR NILAI INVESTASI

FORMULASI PERHITUNGAN

*Nilai investasi = Jumlah investasi yang dilaporkan
oleh investor melalui aplikasi BKPM
= Rp. 30.955.440.525,00*

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI REALISASI INVESTASI 2021

OPD : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 Bulan /Tahun : Triwulan III Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	TARGET		Realisasi Kinerja (Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan/ Tahunan)	Progres Capaian Kinerja (%)		Uraian Singkat Progres kinerja yang Dicapai pada bulan laporan
			Tahun 2021	Triwulan ke III		Tahun 2021	Triwulan ke III	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4 (%)	8= 6/5 (%)	9
1	Nilai Investasi	Rupiah	10.000.000.000,-	8.000.000.000,-	30.955.440.525	309,6	387,0	Indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian nya sebesar 387,0%.

MENGETAHUI
 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
 TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



ISMIAJUN, SE.
 NIP. 19651011 198903 2 005

SELATPANJANG , 18 November 2021
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

MUHLISIN, S.Kom.
 NIP. 19790409 201001 1 014

REKAP DATA LKPM PERUSAHAAN 2021
Status Disetujui

No	Tanggal Laporan	No Laporan	Nama Perusahaan	Jenis Laporan	Proyek	Disetujui Oleh	Status	Tambahan Investasi
1	2021-04-07 08:55:59.0	LK900226	PT. PELAYARAN ERAMAS MARINDO	KONSTRUKSI (Triwulan I 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (50132) Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang	Investor	Disetujui	40,000,000.00
2	2021-04-07 22:20:10.0	LK906642	PT. NATIONAL SAGO PRIMA	PRODUKSI (Triwulan I 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (1061) Industri Penggilingan Serelia Dan Bij-Bijian Lainnya (Bukan Beras Dan Jagung)	Investor	Disetujui	0
3	2021-04-08 15:48:05.0	LK913084	CV. DYVA PRATAMA SEJAHTERA	KONSTRUKSI (Triwulan I 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (55120) Hotel Melati	Investor	Disetujui	5,466,000,000.00
4	2021-04-12 09:12:50.0	LK932463	PT. MAS ARTHA SARANA	PRODUKSI (Triwulan I 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	2,463,927,925.00
5	2021-07-03 15:15:34.0	LK1021719	Koperasi KOPSILVA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	255,000,000.00
6	2021-07-05 09:05:41.0	LK1023228	PT. MAS ARTHA SARANA	PRODUKSI (Triwulan I 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	0
7	2021-07-05 11:24:34.0	LK1025160	(Perorangan) AMIRUDDIN	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (10622) Industri Berbagai Macam Pati Palma	Investor	Disetujui	484,322,000.00
8	2021-07-05 11:51:40.0	LK1025463	(Perorangan) AMIRUDDIN	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46209) Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Investor	Disetujui	222,000,000.00
9	2021-07-06 09:37:01.0	LK1030349	PT. HOTEL GRAND MERANTI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (5511) Hotel Bintang	Investor	Disetujui	0
10	2021-07-06 15:49:30.0	LK1035305	PT. INDOBARU GRAHA MERANTI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (5511) Hotel Bintang	Investor	Disetujui	43,889,000.00
11	2021-07-06 16:00:27.0	LK1035437	PT. MERANTI SOPIA JAYA MANDIRI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	38,000,000.00
12	2021-07-06 16:05:31.0	LK1035462	PT. MERANTI SOPIA JAYA MANDIRI	PRODUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (47301) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di Spbu	Investor	Disetujui	0
13	2021-07-06 16:13:41.0	LK1035546	PT. MERANTI SOPIA JAYA MANDIRI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (52101) Pergudangan Dan Penyimpanan	Investor	Disetujui	209,900,000.00
14	2021-07-06 16:16:40.0	LK1035562	PT. MERANTI SOPIA JAYA MANDIRI	PRODUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (47772) Perdagangan Eceran Gas Elpiji	Investor	Disetujui	0
15	2021-07-06 16:18:28.0	LK1035573	PT. MERANTI SOPIA JAYA MANDIRI	PRODUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	0
16	2021-07-08 10:46:15.0	LK1046980	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	210,000,000.00
17	2021-07-08 10:49:06.0	LK1047044	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	210,000,000.00
18	2021-07-08 11:54:06.0	LK1048036	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	95,000,000.00
19	2021-07-08 15:00:54.0	LK1050757	PT. MUTIARA RISIKI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (35202) Distribusi Gas Alam Dan Buatan	Investor	Disetujui	0
20	2021-07-08 16:36:53.0	LK1052056	PT. NATIONAL SAGO PRIMA	PRODUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (1061) Industri Penggilingan Serelia Dan Bij-Bijian Lainnya (Bukan Beras Dan Jagung)	Investor	Disetujui	0
21	2021-07-09 10:39:56.0	LK1056436	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	0
22	2021-07-09 11:16:35.0	LK1057253	PT. TUJUH SAUDARA SEJAHTERA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (47301) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di Spbu	Investor	Disetujui	0
23	2021-07-09 11:17:59.0	LK1057283	PT. TUJUH SAUDARA SEJAHTERA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	0
24	2021-07-09 13:06:33.0	LK1058725	CV. PUTRA TENAN PERKASA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (41015) Konstruksi Gedung Kesehatan	Investor	Disetujui	455,000,000.00
25	2021-09-03 10:07:13.0	LK1114166	PT. SAN SAN HOTEL	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (55120) Hotel Melati	Investor	Disetujui	511,000,000.00
26	2021-09-06 14:23:27.0	LK1116030	PT. PELAYARAN ERAMAS MARINDO	KONSTRUKSI (Triwulan II 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (50132) Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang	Investor	Disetujui	80,000,000.00

27	2021-10-01 19:05:01.0	LK1136963	PT. SAN SAN HOTEL	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (55120) Hotel Melati	investor	Disetujui	-0,000,000.00
28	2021-10-04 08:33:34.0	LK1139119	CV. PUTRA TENAN PERKASA	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (41015) Konstruksi Gedung Kesehatan	investor	Disetujui	265,000,000.00
29	2021-10-04 14:26:53.0	LK1142950	PT. MAS ARTHA SARANA	PRODUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	0
30	2021-10-05 11:13:27.0	LK1146368	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	205,000,000.00
31	2021-10-05 11:18:27.0	LK1146431	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	205,000,000.00
32	2021-10-05 12:06:48.0	LK1146914	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	105,000,000.00
33	2021-10-05 12:09:46.0	LK1146933	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	105,000,000.00
34	2021-10-06 14:54:58.0	LK1154847	CV. SAWERIGADING JAYA RAYA	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (47219) Perdagangan Ecran Hasil Pertanian Lainnya	investor	Disetujui	140,000,000.00
35	2021-10-07 10:53:44.0	LK1159343	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	200,000,000.00
36	2021-10-07 10:56:08.0	LK1159397	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	200,000,000.00
37	2021-10-07 10:57:33.0	LK1159425	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	110,000,000.00
38	2021-10-07 11:02:38.0	LK1159528	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	260,000,000.00
39	2021-10-07 11:03:36.0	LK1159558	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	260,000,000.00
40	2021-10-07 11:04:30.0	LK1159582	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	110,000,000.00
41	2021-10-07 11:17:27.0	LK1159601	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	205,000,000.00
42	2021-10-07 11:19:25.0	LK1159643	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	205,000,000.00
43	2021-10-07 11:26:30.0	LK1159666	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	255,000,000.00
44	2021-10-07 11:27:49.0	LK1159964	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	255,000,000.00
45	2021-10-07 11:31:28.0	LK1180026	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	255,000,000.00
46	2021-10-07 11:32:45.0	LK1180051	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	255,000,000.00
47	2021-10-07 11:38:33.0	LK1180137	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	164,000,000.00
48	2021-10-07 11:41:02.0	LK1180181	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	164,000,000.00
49	2021-10-07 11:44:33.0	LK1180253	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	200,000,000.00
50	2021-10-07 11:48:07.0	LK1180307	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	200,000,000.00
51	2021-10-07 11:51:57.0	LK1180381	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	131,000,000.00
52	2021-10-07 11:53:24.0	LK1180411	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	131,000,000.00
53	2021-10-07 11:58:52.0	LK1180480	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	205,000,000.00
54	2021-10-07 12:00:14.0	LK1180496	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	205,000,000.00

55	2021-10-07 14:01:48.0	LK1161808	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	125,000,000.00
56	2021-10-07 14:03:12.0	LK1161827	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	125,000,000.00
57	2021-10-07 14:04:17.0	LK1161844	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	105,000,000.00
58	2021-10-07 14:05:24.0	LK1161858	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	105,000,000.00
59	2021-10-07 20:04:06.0	LK1165054	(Perancangan) AMIRUDDIN	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (10622) Industri Berbagai Macam Pati Palma	Investor	Disetujui	3,875,554,600.00
60	2021-10-07 20:11:00.0	LK1165074	(Perancangan) AMIRUDDIN	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (52101) Perdagangan Dan Penyimpanan	Investor	Disetujui	322,000,000.00
61	2021-10-07 20:15:13.0	LK1165093	(Perancangan) AMIRUDDIN	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46209) Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Investor	Disetujui	4,359,876,600.00
62	2021-10-08 09:19:07.0	LK1166813	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	305,000,000.00
63	2021-10-08 09:20:44.0	LK1166841	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	305,000,000.00
64	2021-10-08 09:21:51.0	LK1166861	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	67,000,000.00
65	2021-10-08 09:23:16.0	LK1166900	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	67,000,000.00
66	2021-10-08 09:24:25.0	LK1166923	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	67,000,000.00
67	2021-10-08 09:25:34.0	LK1166942	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	67,000,000.00
68	2021-10-08 09:45:47.0	LK1167340	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	204,000,000.00
69	2021-10-08 09:47:06.0	LK1167372	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	204,000,000.00
70	2021-10-08 09:47:54.0	LK1167390	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	204,000,000.00
71	2021-10-08 09:48:45.0	LK1167406	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	204,000,000.00
72	2021-10-08 09:49:31.0	LK1167423	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	305,000,000.00
73	2021-10-08 09:50:19.0	LK1167438	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	305,000,000.00
74	2021-10-08 11:06:46.0	LK1169048	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	155,000,000.00
75	2021-10-08 11:08:10.0	LK1169070	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	155,000,000.00
76	2021-10-08 11:09:08.0	LK1169092	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	205,000,000.00
77	2021-10-08 11:10:02.0	LK1169109	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	205,000,000.00
78	2021-10-08 11:24:06.0	LK1169365	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	205,000,000.00
79	2021-10-08 13:00:50.0	LK1170264	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	205,000,000.00
80	2021-10-08 13:06:13.0	LK1170346	(Perancangan) PANLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Investor	Disetujui	155,000,000.00
81	2021-10-08 13:11:45.0	LK1170432	(Perancangan) PANLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	155,000,000.00
82	2021-10-08 13:35:45.0	LK1170872	(Perancangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	Investor	Disetujui	160,000,000.00

83	2021-10-06 13:38:09.0	LK1170917	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46810) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	160,000,000.00
84	2021-10-06 13:38:19.0	LK1170945	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	110,000,000.00
85	2021-10-06 13:48:34.0	LK1170973	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46810) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	110,000,000.00
86	2021-10-08 13:54:58.0	LK1171275	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46810) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	160,000,000.00
87	2021-10-08 13:58:25.0	LK1171315	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	100,000,000.00
88	2021-10-08 13:57:20.0	LK1171330	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	110,000,000.00
89	2021-10-08 13:58:12.0	LK1171347	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46810) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	110,000,000.00
90	2021-10-08 14:22:47.0	LK1171901	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	160,000,000.00
91	2021-10-08 14:24:09.0	LK1171932	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46810) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	160,000,000.00
92	2021-10-08 14:25:03.0	LK1171954	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46810) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	110,000,000.00
93	2021-10-08 14:25:59.0	LK1171971	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	55,000,000.00
94	2021-10-08 14:58:12.0	LK1172791	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	160,000,000.00
95	2021-10-08 14:58:17.0	LK1172822	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46810) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	160,000,000.00
96	2021-10-08 15:08:23.0	LK1172851	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (02209) Usaha Kehutanan Lainnya	investor	Disetujui	160,000,000.00
97	2021-10-08 15:01:28.0	LK1172863	(Perorangan) PANGLONG ARANG	KONSTRUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (46810) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	investor	Disetujui	160,000,000.00
98	2021-10-10 19:18:44.0	LK1185341	PT. NATIONAL SAGO PRIMA	PRODUKSI (Triwulan III 2021)	(1410) Kabupaten Kepulauan Meranti - (1081) Industri Penggilingan Serelia Dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras Dan Jagung)	Investor	Disetujui	0
TOTAL								Rp 30,955,440,625



DATA EVIDEN (2)

INDIKATOR TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\begin{aligned} & \textit{Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja} \\ &= \frac{\textit{Angkatan Kerja}}{\textit{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.60 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.43 %

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Selatpanjang, 11 Januari 2022

Pj. Kabid. Tenaga Kerja



SISKA PRIMA SARI, SH
NIP. 19841207 201102 2 002

Keterangan : Badan Pusat Statistik Belum Mengeluarkan Data Tahun 2021

